

BAB I

PENDAHULUAN

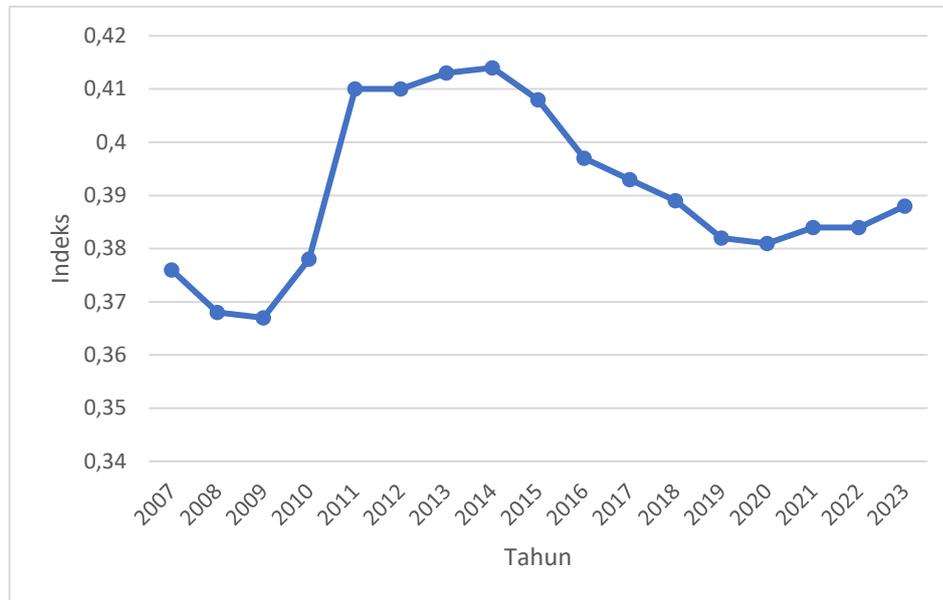
1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketimpangan pendapatan bukan sekadar permasalahan ekonomi, tetapi juga isu struktural yang lebih kompleks dibandingkan dengan kemiskinan (Wibowo 2016). Menurut *World Economic Forum* 2014 dalam Wibowo (2016) telah menempatkan ketimpangan pendapatan sebagai risiko global yang harus diwaspadai. Dalam laporan tersebut, WEF telah menempatkan disparitas pendapatan yang parah (*severe income disparity*) menempati peringkat 4 dari 10 risiko global yang menempati prioritas tinggi pada tahun 2014. Ketimpangan pendapatan mempunyai konsep yang lebih luas dibanding kemiskinan. Ketimpangan pendapatan merupakan ukuran untuk semua populasi, tidak hanya terfokus pada rumah tangga miskin.

Tingginya ketimpangan pendapatan dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi karena memperlebar kesenjangan sosial dan mengurangi akses terhadap peluang ekonomi bagi kelompok berpendapatan rendah. Selain itu, ketimpangan pendapatan yang berlarut-larut dapat menghambat pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Patta (2012) dalam (Nursa Fitri dkk., 2021) juga menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Ketimpangan pendapatan di Indonesia sampai saat ini terus menjadi suatu permasalahan dan memiliki tingkat ketimpangan yang berbeda pada setiap wilayahnya. Salah satu metode yang digunakan dalam pengukuran ketimpangan pendapatan adalah Gini Rasio. Menurut Badan Pusat Statistik (2024), Gini Ratio memiliki nilai dari 0 hingga 1. Indeks ini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan, di mana semakin tinggi nilai koefisien Gini, semakin besar ketimpangan yang terjadi, sebaliknya, semakin rendah nilainya, semakin merata distribusi pendapatan. Secara praktik, koefisien Gini pada negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,75, sedangkan pada negara

dengan ketimpangan pendapatan yang lebih rendah, nilainya berada di rentang 0,20 hingga 0,35. Semakin besar nilai koefisien Gini mencerminkan semakin tidak meratanya pendapatan, sementara nilai yang lebih kecil menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin merata (Wijayanti dkk., 2023).



Gambar 1. 1 Gini Ratio Indonesia

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2024) diolah

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, Indonesia memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang tergolong sedang, dengan Gini Ratio berada dalam rentang 0,3 hingga 0,5 (Wibowo, 2016). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kelompok berpendapatan rendah dan kelompok berpendapatan tinggi. Tren Gini Ratio mengalami peningkatan tajam pada tahun 2011–2012, mencapai puncaknya di angka 0,41, yang kemungkinan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak merata serta kebijakan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Namun, sejak 2015, terjadi penurunan bertahap hingga mencapai titik terendah pada tahun 2020, yang bertepatan dengan pandemi COVID-19. Penurunan ini dapat dihubungkan dengan dampak pandemi yang memperlambat aktivitas ekonomi secara luas, sehingga mengurangi kesenjangan pendapatan akibat penurunan pendapatan di semua kelompok masyarakat. Pasca pandemi, Gini Ratio kembali menunjukkan

peningkatan pada tahun 2022–2023, menandakan bahwa pemulihan ekonomi belum merata. Hal ini mencerminkan bahwa upaya yang lebih terarah masih diperlukan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

Ketimpangan pendapatan salah satunya disebabkan karena tidak meratanya distribusi pendapatan yang diterima masyarakat. Terdapat kesenjangan pendapatan penduduk berpenghasilan tinggi dan penduduk berpenghasilan rendah, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketimpangan pendapatan (Shinetiara & Adry, 2023). Faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya pendapatan individu berasal dari karakteristik internal tenaga kerja itu sendiri, yang berkaitan erat dengan konsep modal manusia (*human capital*). Modal manusia mengacu pada investasi dalam pendidikan, keterampilan, kesehatan dan penguasaan teknologi yang meningkatkan kapasitas individu untuk bekerja secara produktif.

Disampaikan oleh Alisjahbana (2012), bahwa permasalahan ketimpangan pendapatan merupakan suatu permasalahan jangka panjang, sehingga untuk memperbaiki ketimpangan pendapatan diperlukan langkah kebijakan yang komprehensif dan jangka panjang pula. Hal ini telah diupayakan pemerintah dengan meluncurkan berbagai kebijakan dan inisiatif yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, kesehatan hingga penguasaan teknologi, diharapkan kualitas SDM dapat terus meningkat.

Dengan meningkatnya kualitas SDM, kesempatan untuk memasuki pasar kerja semakin besar, sehingga individu dapat memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan berpenghasilan lebih tinggi. Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dengan mempersempit kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Frank & Bernanke (2007) dalam penelitiannya menekankan pentingnya *human capital* dalam mendorong produktivitas dan inovasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan individu. Sebagaimana dikemukakan oleh (Todaro & Smith, 2020), pendidikan dan kesehatan menjadi komponen penting dalam *human capital* yang langsung berdampak pada peningkatan kapasitas

individu untuk berpartisipasi dalam perekonomian dan memperoleh pendapatan yang lebih baik. Dengan kata lain, investasi pada SDM tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga dapat berfungsi sebagai strategi untuk memperkecil jurang ketimpangan pendapatan, dengan memperbesar peluang ekonomi bagi mereka yang sebelumnya kurang beruntung (Hanapiah, 2011).

Tingkat pendidikan merupakan faktor mendasar yang mempengaruhi pendapatan seseorang. Individu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki akses terhadap pekerjaan dengan upah yang lebih baik dibandingkan mereka yang hanya memiliki pendidikan dasar. Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan seseorang memperoleh keterampilan yang lebih kompleks dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Selain pendidikan, keterampilan juga memainkan peran penting dalam menentukan pendapatan seseorang. Pekerja dengan keterampilan yang relevan dan tersertifikasi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang kompetitif. Keterampilan ini tidak hanya mencakup keahlian teknis tetapi juga keterampilan non-teknis seperti komunikasi, manajemen waktu, dan kerja sama tim yang semakin dihargai oleh perusahaan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan menjadi bagian penting dari modal manusia yang dapat meningkatkan produktivitas individu.

Kesehatan individu memainkan peran krusial dalam menentukan tingkat pendapatan seseorang. Kondisi kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk bekerja secara optimal, memiliki produktivitas tinggi, dan meminimalkan absensi akibat penyakit. Sebaliknya, kesehatan yang buruk dapat menghambat kemampuan kerja, menurunkan produktivitas, dan pada akhirnya berdampak negatif pada pendapatan.

Di era digital saat ini, penguasaan teknologi menjadi faktor yang semakin penting dalam menentukan pendapatan seseorang. Kemajuan teknologi telah mengubah pola kerja dan menuntut keterampilan baru yang lebih berbasis digital. Pekerja yang mampu menguasai teknologi, seperti penggunaan perangkat lunak khusus, analisis data, kecerdasan buatan, serta pemanfaatan platform digital, memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi. Selain itu, teknologi juga memungkinkan munculnya berbagai peluang kerja

baru, termasuk pekerjaan berbasis *gig economy* dan *remote working*, yang dapat meningkatkan fleksibilitas serta kesejahteraan tenaga kerja.

Produktivitas individu juga berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan seseorang. Pekerja yang mampu menyelesaikan tugas dengan efisien dan berkualitas tinggi cenderung mendapatkan kompensasi lebih besar dibandingkan mereka yang kurang produktif. Produktivitas ini dapat ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan, penggunaan teknologi dalam bekerja, serta budaya kerja yang mendukung inovasi dan efisiensi. Dengan meningkatkan modal manusia dalam bentuk keterampilan dan teknologi, produktivitas individu dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan.

Menggunakan pendekatan teori pertumbuhan endogen, Romer (1990) menggarisbawahi peran *human capital* sebagai faktor utama dalam menciptakan ide-ide inovatif yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Dengan adanya teknologi yang terus berkembang, pekerja yang terampil akan lebih efisien dalam pekerjaan mereka, yang meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan mereka (Adriani, 2019). Peningkatan teknologi, apabila diiringi dengan pendidikan yang memadai, akan memperkuat dampak positif terhadap produktivitas dan pendapatan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru yang lebih baik.

Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat memicu berbagai dampak negatif pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, ketimpangan yang tinggi mengarah pada melemahnya kohesi sosial, yang mengurangi rasa persatuan, solidaritas, dan kepercayaan antar anggota masyarakat. Hal ini dapat memperburuk polarisasi sosial, yang terlihat dalam perbedaan tajam antara kelompok ekonomi atas dan bawah. Ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok dengan pendapatan rendah memunculkan perasaan ketidakpuasan dan frustrasi, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Liebig (2012) dalam *The Spirit Level* menunjukkan bahwa negara-negara dengan ketimpangan yang tinggi cenderung mengalami masalah sosial yang lebih besar, seperti tingkat kriminalitas yang lebih tinggi, kesehatan yang buruk, serta rendahnya kepercayaan sosial. Ketimpangan yang melebar menciptakan jarak sosial yang signifikan, yang memperburuk interaksi

antara kelompok masyarakat yang seharusnya dapat bekerja bersama dalam memajukan ekonomi.

Untuk mengatasi tantangan ini, investasi dalam sumber daya manusia (SDM) menjadi langkah krusial. Investasi SDM yang fokus pada peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan, kesehatan, dan penguasaan teknologi dapat memperkecil ketimpangan dengan memberikan individu dari kelompok pendapatan rendah peluang yang lebih besar untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dalam pasar tenaga kerja. Investasi dalam pendidikan, khususnya, dapat meningkatkan kapasitas individu untuk berkontribusi secara produktif dalam perekonomian, yang pada gilirannya meningkatkan peluang mereka untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, strategi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan harus melibatkan kebijakan yang memprioritaskan investasi dalam SDM. Dengan memberikan akses yang lebih luas dan setara terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, dan melek teknologi, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, dengan distribusi pendapatan yang lebih merata dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Sari & Sugiarto (2024), faktor-faktor seperti pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan tidak hanya meningkatkan keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga mempengaruhi bagaimana individu tersebut berinteraksi dengan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, perlu adanya kebijakan yang memperkuat akses pendidikan dan pelatihan kerja, serta memfasilitasi akses teknologi di seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap dalam literatur yang ada dengan fokus pada pengaruh investasi sumber daya manusia dengan variabel pendidikan, pelatihan kerja, kesehatan, teknologi, usia, jenis kelamin, pengalaman kerja dan klasifikasi wilayah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Menggunakan data terbaru pada tahun 2023 dan regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) untuk menganalisis hubungan variabel-variabel tersebut.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai bagaimana hubungan investasi SDM pada sektor pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan teknologi dengan ketimpangan pendapatan. Untuk analisis lebih lanjut, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Hubungan Investasi Sumber Daya Manusia Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan investasi sumber daya manusia pada aspek pendidikan dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan investasi sumber daya manusia pada aspek pelatihan kerja dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia?
3. Bagaimana hubungan investasi sumber daya manusia pada aspek kesehatan dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia?
4. Bagaimana hubungan investasi sumber daya manusia pada aspek teknologi dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis hubungan investasi sumber daya manusia pada aspek pendidikan dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia.
2. Menganalisis hubungan investasi sumber daya manusia pada aspek pelatihan kerja dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia.
3. Menganalisis hubungan investasi sumber daya manusia pada aspek kesehatan dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia.
4. Menganalisis hubungan investasi sumber daya manusia pada aspek teknologi dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hubungan antara investasi sumber daya manusia dan ketimpangan pendapatan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat terhadap instrumen kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif terkait investasi sumber daya manusia, sehingga mampu mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja.

2. Manfaat terhadap akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait hubungan antara investasi sumber daya manusia dan ketimpangan pendapatan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, serta memberikan dasar bagi penelitian lanjutan tentang faktor-faktor lain yang berhubungan ketimpangan pendapatan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada cakupan nasional, yaitu Indonesia untuk menganalisis hubungan investasi sumber daya manusia dan ketimpangan pendapatan. Investasi sumber daya manusia yang dianalisis mencakup pendidikan, pelatihan kerja, kesehatan dan teknologi. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2023. Tahun 2023 dipilih sebagai periode penelitian karena menyediakan data terbaru yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi terkini, termasuk dinamika ketimpangan yang masih menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional.